

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI CASH MANAGEMENT SYSTEM TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

M. Husni Thamrin^{1,2}, Ahmad Yamin^{*1,3}, Rodianto⁴

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

⁴Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa

ahmad.yamin@uts.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan sistem pengelolaan kas dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan asosiatif atau relasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang berjumlah 114 orang. Uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikenal dengan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan persamaan yang termasuk dalam bidang Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cash management system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan dengan nilai t-statistik sebesar 26,389 lebih besar dari t-tabel, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian intern dengan t nilai -statistik 19,884 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,65, dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai t-statistik 22,790 lebih besar dari 1,65. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengelolaan kas di desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat, maka semakin baik pula penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern, dan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kata kunci: Cash Managemen System (CMS), Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of the cash management system application and the presentation of financial reports on village financial management with the internal control system as a mediating variable in West Sumbawa Regency. This research is a quantitative research, with data analysis using an associative or relational approach. The sample used in this study was village officials in West Sumbawa Regency, totaling 114 people. The validity test and reliability test carried out in this study used a data analysis method known as Partial Least Square (PLS). PLS is an equation that belongs to the field of Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the application of the cash management system had a positive and significant effect on the presentation of financial statements with a t-statistic value of 26.389 greater than t-table, a positive and significant effect on the internal control system with a t-statistic value of 19.884 greater from the t-table which is 1.65, and has a positive and significant effect on village financial management with a t-statistical value of 22.790 greater than 1.65. Based on the previous discussion, it can be concluded that the better the implementation of the cash management system

in the villages of West Sumbawa Regency, the better the presentation of financial reports, internal control systems, and village financial management in West Sumbawa Regency.

Keywords : Cash Management System (CMS), Financial Report Presentation Internal Control System, Village Financial Management

A. PENDAHULUAN

yang mengatur mengenai desa di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Desa disahkan, pengelolaan keuangan desa diatur oleh undang-undang yang lebih umum, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan lainnya. Pada tanggal 6 Desember 2014, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah penting dalam penguatan peran desa dalam pembangunan dan pengelolaan keuangannya. Sejak saat itu, desa memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangannya. Undang-Undang Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta memberdayakan desa untuk mengurus urusan lokalnya secara mandiri. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi peraturan pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyusun APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan warga desa. Selain Undang-Undang Desa, terdapat juga peraturan lain yang turut mengatur pengelolaan keuangan desa, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menguraikan tata cara pengelolaan keuangan desa secara lebih terperinci, termasuk penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diatur mengenai alokasi dana desa, tata cara penyusunan APBDesa, pengawasan keuangan desa, serta tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keuangan desanya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Beberapa perubahan dan penyesuaian peraturan telah dilakukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting karena dapat berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Melalui otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Desa, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal mereka untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi teknologi menandai momentum transformasi di segala bidang termasuk bidang keuangan. Era digitalisasi di bidang keuangan memicu penggunaan teknologi internet, telepon pintar dan big data yang mampu menyentuh sampai ke konsumen atau pengguna akhir Wardhana (2022). Era

digitalisasi keuangan mampu menciptakan kegiatan menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya.

Digitalisasi keuangan di pemerintahan diwujudkan dalam bentuk sebuah sistem yang disebut Cash management system (CMS). Sistem berbasis teknologi ini bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabilitas. Dasar hukum untuk melaksanakan CMS adalah Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2016) dengan menyebutkan, untuk memantau rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dilakukan melalui sebuah system yang disebut Cash management system (CMS). Pelaksanaannya, setiap transaksi, penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan secara non tunai (transaksi non cash).

Penerapan CMS diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan memudahkan pelacakan. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Masniadi, 2022). Cash management system atau sistem manajemen kas adalah sebuah proses untuk mengelola arus kas atau uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu organisasi atau bisnis. Sistem ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan uang tunai, termasuk pengumpulan, penerimaan, pengeluaran, dan pengawasan uang tunai (Makmur, 2015). Manajemen kas merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan bisnis, karena pengelolaan uang tunai yang efektif dapat membantu organisasi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko keuangan. Beberapa

manfaat dari implementasi sistem manajemen kas yang baik antara lain Mengurangi risiko kehilangan uang: Dengan adanya sistem manajemen kas yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dan terkelola dengan baik. Hal ini dapat membantu mencegah kehilangan uang atau penipuan (Juniarti, 2014).

Menurut hasil penelitian Juliansyah (2017) cash management system dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan uang tunai. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola uang tunai dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan keuangan, kemudian dengan adanya sistem manajemen kas yang baik, organisasi dapat memantau arus kas mereka secara real-time dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Meningkatkan pengambilan keputusan: Sistem manajemen kas yang efektif dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam mengimplementasikan sistem manajemen kas, organisasi dapat menggunakan berbagai jenis teknologi, seperti perangkat lunak manajemen kas, mesin penjual otomatis, atau bahkan sistem pembayaran digital. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan uang tunai.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa, menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa menjadi tingkat pemerintahan terendah di Indonesia, namun keberadaannya sangat penting sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak publik dalam hubungannya dengan

masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yaitu pembangunan pemerintahan dari wilayah bawah atau pinggiran. Dengan disahkannya undang-undang desa diharapkan menjadi kekuatan baru bagi pemerintah desa untuk memajukan desanya (Putri & Maryono, 2022).

Pemerintah desa sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa diberikan kesempatan untuk mengelola secara mandiri keuangan desa serta mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Wahyudi, dkk. 2019). Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu aspek pemerintahan yang baik. Salah satu unsur utama dari pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas.

Berbagai penelitian tentang desa sudah banyak dilakukan di Wilayah Indonesia, namun penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa belum banyak dilakukan. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa maka aparat desa dapat menentukan langkah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan desa merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah desa karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah desa sehingga nantinya dapat mewujudkan akuntabilitas (Mawaddah, 2019). Penelitian yang dilakukan Astungkara dkk. (2022), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilani dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh terhadap efektivitas cash management system terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu aksesibilitas laporan keuangan. Pemerintah desa harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola dana publik (Nurhayati, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasih dkk. (2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Hehanussa (2015) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal dibuat oleh pemerintah agar setiap elemen yang ada dalam pemerintahan memiliki suatu aturan

yang tersusun dan terorganisir dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Mualifu, 2019). Menurut Mufti (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2019) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari pengendalian internal desa, hal ini dikarenakan pengendalian internal desa merupakan salah satu bentuk media manajemen desa dalam mengontrol dan mengevaluasi setiap lini kegiatan desa yang telah rencanakan dan telah dilakukan (Harahap, 2018). Namun, permasalahan pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dan efisien telah menjadi sorotan publik sehingga membuat kasus tindak pidana korupsi dana desa rawan terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi disektor anggaran desa terus meningkat. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi disektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat 126 kasus korupsi disektor anggaran desa dari 169 kasus korupsi selama tahun 2020 dan selama tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi sektor anggaran desa dari 200 kasus korupsi (katadata.co.id, 2022).

Beberapa kasus pengelolaan keuangan desa terletak pada permasalahan rumit dan lamanya proses penyaluran dan penggunaan kas yang ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2019 terdapat beberapa desa Di Kabupaten Sumbawa Barat yang masih belum beradaptasi dengan aplikasi system management cash. Memandang aplikasi CMS ini sangat penting, segala bentuk pembayaran maupun transaksi yang dilakukan oleh aparat desa nantinya bisa langsung dibayar nontunai seutuhnya melalui aplikasi CMS ini, sehingga tidak ada lagi melalui proses manual seperti selama ini yang bisa tertunda jika pejabat

terkait sedang ada tugas diluar daerah karena tak ada yang menandatangani. Pada umumnya, melalui aplikasi ini semua pejabat desa yang melakukan proses pembayaran atau transaksi kas desa, dapat bekerja atau merespon dimana saja hanya dengan menggunakan smartphone atau laptop yang tersambung internet, dimana proses pembayaran yang dibutuhkan tetap bisa berjalan. Penerapan aplikasi CMS ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang saat ini CMS sudah disebarkan di pemerintah desa Kabupaten Sumbawa Barat dengan total 57 desa. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Aplikasi Cash Management System terhadap Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengelolaan Keuangan Desa".

B. LANDASAN TEORI

Sebuah layanan pengelolaan kas yang menggunakan jaringan internet agar sebuah perusahaan/instansi pemerintahan mudah dalam melakukan proses pengumpulan dan pengelolaan uang tunai, untuk digunakan sebagai investasi jangka pendek. Bendahara perusahaan/instansi pemerintahan serta atasan terkait sering sekali bertanggung jawab atas manajemen kas secara keseluruhan. Maka dari itu, sebuah perusahaan/instansi pemerintahan sangat membutuhkan aplikasi Cash Management System (Menenal Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Cash Management System) Berbasis (Masdar, 2022).

Aplikasi adalah sebuah program berbentuk perangkat lunak yang beroperasi pada suatu sistem tertentu yang mempunyai tujuan untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan aplikasi CMS merupakan sebuah layanan aplikasi online yang diperuntukkan bagi perusahaan atau institusi untuk memenuhi segala kebutuhan perbankan (Mawaddah, 2019). Aplikasi CMS sangat erat kaitannya dengan layanan yang diperuntukkan bagi perusahaan atau instansi yang ada pada perbankan. Pengaplikasian CMS yang

terjadi secara real time yang memberikan keterangan mengenai penggunaan aplikasi CMS terhadap penggunaannya seperti bendahara pada suatu perusahaan atau instansi pemerintahan.

Cash Management System adalah sebuah layanan perbankan berbasis internet yang memungkinkan nasabah perusahaan atau instansi melakukan monitoring transaksi keuangan melalui fasilitas internet online setiap saat. Hal ini untuk menentukan efisiensi waktu dan biaya dalam pengelolaan pemerintahan dan kejelasan transaksi arus kas. Keputusan dapat diambil dengan cepat, tepat dan akurat sehingga peningkatan daya saing pemerintahan di era yang semakin dinamis seperti saat ini lebih terjamin (Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018). Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 910/1866/SI tanggal 17 april 2017 tentang Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 april 2017 tentang Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2017).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa CMS adalah sebuah aplikasi layanan perbankan yang dijadikan sebagai rekapan data dari segala transaksi yang terjadi baik dari pihak internal maupun eksternal. Pengelolaan CMS tidak hanya untuk menghindari kebangkrutan, tetapi juga untuk mengurangi rata-rata piutang jangka panjang yang beredar, meningkatkan dalam hal penagihan serta meningkatkan transaksi non-tunai untuk meningkatkan posisi kas dan profitabilitas perusahaan (Mengenal Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Cash Management System) Berbasis pengendalian internal.

C. METODE

Berdasarkan pada masalah dan tujuannya, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel penelitian melalui hipotesis yang

akan diuji untuk mengetahui pola pengaruh dan hubungan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses pencarian pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat untuk menganalisis suatu masalah yang akan diteliti. Dari angka-angka yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai bahan representasi dari informasi yang diperoleh dalam penelitian dan dari angka-angka yang diperoleh tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan dibangun analisis penelitian (Arikunto, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023-Mei 2023, sedangkan lokasi penelitian berada di 57 desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 114 responden. Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Istilah PLS secara khusus berarti perhitungan kesesuaian kuadrat terkecil yang optimal dengan matriks korelasi atau varians. PLS merupakan analisis persamaan Structural Equation Model (SEM).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat empat kriteria dalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, Cronbach's Alpha, Composite Reliability.

- 1) Convergent Validity dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau skor komponen dengan skor konstruk. Nilai AVE (Average Variance Extranced), indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5.

Tabel 1. Output Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan (AVE >0.50)
Cash Management System (X1)	0,573	Valid

Laporan Keuangan Desa (Y1)	0,575	Valid
Sistem Pengendalian Internal (Y2)	0,581	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa (Y3)	0,524	Valid

2) Hasil pengujian discriminant validity dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua indikator dinyatakan valid, karena nilai *Fornell-Larcker Criterion* > 0,5. Adapun untuk lebih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Nilai *Discriminant Validity* (*Fornell-Larcker Criterion*)

	Aplikasi Cash Management System (CMS) (X)	Village Financial Management (Y3)	Penyajian Laporan Keuangan (Y1)	Sistem Pengendalian Internal (Y2)
Aplikasi Cash Management System (CMS) (X)	0,757			
Pengelolaan Keuangan Desa (Y3)	0,808	0,759		
Penyajian Laporan Keuangan (Y1)	0,782	0,777	0,766	
Sistem Pengendalian Internal (Y2)	0,751	0,819	0,765	0,723

3) Peryaratan sebuah konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2014). Sedangkan konstruk dinyatakan reliabel dengan tingkat keandalan yang baik jika memiliki nilai cronbach alpha di atas 0,70. Adapun hasil uji realibilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Output Cronbach Alpha dan Composite Reliability

Konstru k Variabel	Cronbach Alpha	Composi te Reliabilit y	Keterang an
Cash Managemen t System (X)	0,917	0,931	Reliabel
Penyajian	0,890	0,914	Reliabel

Laporan Keuangan (Y1)			
Sistem Pengendali an Internal (Y2)	0,857	0,892	Reliabel
Pengelolaa n Keuangan Desa (Y3)	0,890	0,914	Reliabel

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh nilai cronbach's alpha dan composite reliability yang berada diatas 0.60 dan 0.70 sebagaimana kriteria yang telah direkomendasikan.

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *convergent validity*, *discriminant validity*, *cronbach's alpha*, *composite reliability* dan *average variance extracted (AVE)*. Selanjutnya, *Evaluasi Goodness of Fit inner* model atau model struktural yang dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dengan melihat nilai *R-square* dan *f-square* untuk *effect size*. Adapun hasil output pada PLS Algorithm sebagai berikut:

1) R-Square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas dari konstruk endogen yang dijelaskan oleh konstruk eksogen pada model struktural. Model struktural yang memiliki *R-square* > 0,67 mengindikasikan bahwa model dinyatakan baik, *R-square* > 0,33 mengindikasikan bahwa model dinyatakan moderat, *R-square* > 0,19 mengindikasikan bahwa model dinyatakan lemah (Ghozali, 2018). Adapun nilai *R-square* pada masing-masing konstruk dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Output *R-Square*

Konstruk	R-Square	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (Y1)	0,612	Moderat
Sistem Pengendalian Internal (Y2)	0,564	Moderat
Pengelolaan Keuangan Desa (Y3)	0,653	Moderat

Berdasarkan nilai kriteria model di atas, konstruk penyajian laporan keuangan desa (Y1), sistem pengendalian internal (Y2) dan pengelolaan keuangan desa (Y3) memiliki model struktural yang moderat, dengan nilai R-Square > 0,33.

- a) Penyajian Laporan Keuangan (Y1) dengan R-Square 0,612, hal ini menjelaskan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan, memiliki pengaruh sedang (moderat) sebesar 61,2% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyajian laporan keuangan desa secara transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat berperan penting dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
 - b) Sistem Pengendalian Internal (Y2) dengan R-Square 0,564, yaitu Sistem Pengendalian Internal, juga memiliki pengaruh sedang (moderat) sebesar 56,4% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang baik dan efektif dalam proses pengelolaan keuangan desa berkontribusi signifikan dalam mencapai akuntabilitas yang lebih baik.
 - c) Pengelolaan Keuangan Desa (Y3) dengan R-Square 0,653, yaitu Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki pengaruh sedang (moderat) sebesar 65,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya, bagaimana keuangan desa dikelola dengan baik dan penuh pertanggungjawaban dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.
- 2) F2 untuk *effect size*, Model struktural yang memiliki nilai $f^2 > 0,02$ maka model dapat dinyatakan lemah, nilai

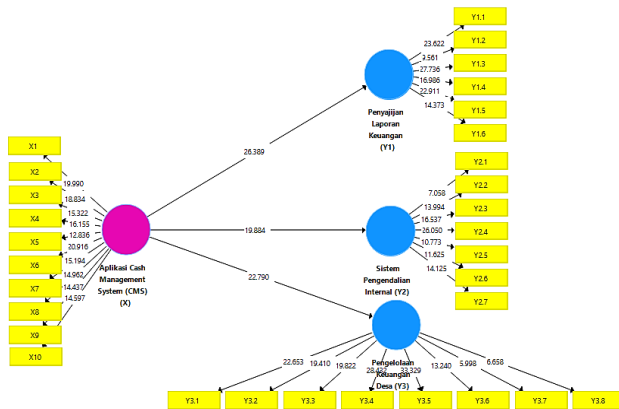
$f^2 > 0,15$ maka model dinyatakan moderat serta nilai $f^2 > 0,35$ maka model dapat dinyatakan kuat pada tingkat struktural. Adapun nilai f^2 untuk *effect size* pada *PLS Algorithm* yaitu:

Tabel 5. Output f-Square

Konstruk	Penyajian Laporan Keuangan (Y1)	Sistem Pengendalian Internal (Y2)	Pengelolaan Keuangan Desa (Y3)	Keterangan
Cash Management System (X1)	1,579	1,292	1,878	Moderat

Berdasarkan pada tabel di atas, Hasil uji statistik *f* menunjukkan bahwa hubungan antara Cash Management System (X) dengan ketiga variabel dependen tersebut (Y1, Y2, dan Y3) adalah signifikan. Nilai *F* yang diperoleh adalah 1,579 untuk variabel Y1, 1,292 untuk variabel Y2, dan 1,878 untuk variabel Y3. Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa Cash Management System memiliki pengaruh moderat terhadap Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sistem keuangan desa yang baik (Cash Management System) dapat berdampak positif pada penyajian laporan keuangan yang lebih baik, sistem pengendalian internal yang lebih efektif, serta pengelolaan keuangan desa yang lebih optimal.

- 3) Pengujian hipotesis antar konstruk baik itu antara konstruk eksogen terhadap konstruk endogen, konstruk endogen terhadap konstruk endogen atau konstruk eksogen terhadap konstruk endogen melalui konstruk endogen lain dilakukan dengan metode *resampling bootstrapping*. Statistik uji yang digunakan adalah uji *t*. nilai *t*-Tabel dengan taraf signifikansi sebesar 10% = 1.65. Adapun hasil output *Path Coefficients* pada *PLS Bootstrapping* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Jalur Setelah Bootstrapping

Berdasarkan hasil output path coefficient di atas menunjukkan bahwa terdapat Tiga hubungan konstruk yang signifikan yaitu pengaruh antara cash management system (X) terhadap penyajian laporan keuangan (Y1), kemudian sistem pengendalian internal (Y2) dan pengelolaan keuangan desa (Y3). Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada nilai original sampel antar Konstruk sebagai berikut:

Tabel 6. Output Path Coefficients

Vaiabel Konstruk	Sampel Asli (O)	T Statistik (O /STDEV)	P-Values
Aplikasi Cash Management System (CMS) (X) -> Penyajian Laporan Keuangan (Y1)	0,782	26,389	0,000
Aplikasi Cash Management System (CMS) (X) -> Sistem Pengendalian Internal (Y2)	0,751	19,884	0,000
Aplikasi Cash Management System (CMS) (X) -> Pengelolaan Keuangan Desa (Y3)	0,808	22,790	0,000

Berikut adalah interpretasi hasil pengujian hipotesis yang dapat dihasilkan dalam Path Coefficients dalam PLS Bootstrapping.

a) Pada hasil analisis yang telah dilakukan, antara variabel konstruk cash management system (X1) dengan penyajian laporan

keuangan (Y1), Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel konstruk cash management system (X1) terhadap penyajian laporan keuangan (Y) dengan nilai t-statistik sebesar 26,389 dan P-values sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X pada Y1 adalah signifikan secara statistik. Selain itu, nilai sampel asli (O) sebesar 0,782 menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel cash management system (X) dengan penyajian laporan keuangan (Y1). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan aplikasi cash management system di desa, maka akan semakin baik pula penyajian laporan keuangan di Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

b) Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, antara variabel konstruk penerapan aplikasi cash management system (X) dengan sistem pengendalian internal (Y2), Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel penerapan aplikasi cash management system (X) terhadap sistem pengendalian internal (Y2) dengan nilai t-statistik sebesar 19,884 dan P-values sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X pada Y2 adalah signifikan secara statistik. Selain itu, nilai sampel asli (O) sebesar 0,751 menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel penerapan aplikasi cash management system (X) dengan sistem pengendalian internal (Y2). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan aplikasi cash management system di desa, maka akan semakin baik pula sistem pengendalian internal di Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, antara variabel

konstruk penerapan aplikasi cash management system (X) dengan pengelolaan keuangan desa (Y3), hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penerapan aplikasi cash management system (X) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y3) dengan nilai t-statistik sebesar 22,790 dan P-values sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X pada Y3 adalah signifikan secara statistik. Selain itu, nilai sampel asli (O) sebesar 0,808 menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel penerapan aplikasi cash management system (X) dengan pengelolaan keuangan desa (Y3). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan aplikasi cash management system di desa, maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan di Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, seluruh tiga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini berhasil diterima. Dalam pembahasan selanjutnya, akan dijelaskan secara teoritis dan dengan dukungan empiris terhadap hasil pengujian hipotesis tersebut.

1) Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan aplikasi cash management system (CMS) (X) terhadap penyajian laporan keuangan (Y1). Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama diterima. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa semakin baik aplikasi cash management system yang digunakan di desa, semakin baik pula penyajian laporan keuangan yang terjadi di desa. Artinya, ketika desa menggunakan aplikasi cash management system yang efektif dan efisien, proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi cash

management system memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di desa. Dengan adanya sistem manajemen kas yang terintegrasi dan terotomatisasi, data keuangan dapat diolah secara lebih efisien, kesalahan dalam pencatatan dapat diminimalkan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ine (2016), Irawan (2018), dan Nugraha (2019) yang mengemukakan bahwa penggunaan atau penerapan aplikasi cash management system yang baik akan membuat penyajian laporan keuangan di desa jadi lebih terintegrasi dan mudah untuk ditelusuri.

2) Berdasarkan pada hasil analisis sebelumnya, di peroleh bahwan penerapan aplikasi cash management system (X) di desa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mampu pengaruhi sistem pengendalian internal (Y2) di desa tersebut, jika dilihat dari hasil pengujian hipotesis kedua dimana nilai t-hitung lebih besar dari pada t tabel ($19,884 > 1,655$) hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya, semakin baik penerapan aplikasi cash management system KSB, semakin baik pula sistem pengendalian internal di desa tersebut. Penggunaan aplikasi cash management system secara efektif dapat membantu meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di desa. Ketika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, maka pengelolaan keuangan di desa dapat lebih teratur, akurat, dan dapat mencegah potensi terjadinya kesalahan, penyalahgunaan, atau kebocoran dana desa. Penerapan aplikasi cash management system yang baik di Desa KSB dapat membantu dalam proses pengelolaan kas dan keuangan desa secara lebih efisien dan transparan. Sistem ini memungkinkan desa untuk melakukan monitoring dan

pengawasan yang lebih baik terhadap arus kas dan pengeluaran, sehingga meminimalkan risiko ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Diana (2017) dan Dewi (2019), dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan aplikasi cash manajemen system yang tepat dan sesuai kebutuhan akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang akurat dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal desa akan semakin baik jika dilakukan dengan aplikasi cash management system yang sesuai.

- 3) Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan aplikasi cash management system (X) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y3). Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh nilai t-statistik lebih besar dari pada nilai t-tabel yaitu $22,790 > 1,65$, hal ini berarti hipotesis ketiga diterima. Dengan kata lain, semakin baik aplikasi cash management system yang di terapkan oleh desa Kabupaten Sumbawa Barat, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa tersebut. Penerapan aplikasi cash management system yang semakin baik oleh desa di Kabupaten Sumbawa Barat berhubungan positif dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan desa tersebut. Artinya, apabila desa menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan terstruktur dengan baik, maka pengelolaan keuangan desa cenderung berjalan dengan lebih optimal. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Susilo (2018), Nugroho (2021) Polutu (2022)

yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah (2020) juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan temuan tersebut, yaitu adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan mengenai, Pengaruh Penerapan Aplikasi Cash Management System Terhadap Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa penerapan aplikasi cash management system (CMS) memiliki pengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan desa, hal ini menunjukkan bahwa penerapan CMS yang baik akan menyajikan laporan keuangan desa yang lebih baik. CMS yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2) Penerapan aplikasi cash management system (CMS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal, hal ini berarti semakin baik aplikasi cash management system yang diterapkan oleh aparatur di desa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), maka semakin baik juga sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi CMS yang baik dan sesuai dengan kebutuhan akan dapat membantu perangkat desa dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

3) Penerapan aplikasi cash management system (CMS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, berarti semakin baik penerapan aplikasi cash management system yang dilakukan oleh desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa tersebut. Hal ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa penerapan teknologi dan informasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di organisasi atau entitas publik.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara aplikasi cash management system, penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan pengelolaan keuangan desa. selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menemukan pengaruh yang lebih akurat dari aplikasi cash management system dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 2) Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan implementasi aplikasi cash management system di desa dan menyediakan pelatihan bagi perangkat desa dalam penggunaannya dan pemerintah juga harus memperkuat sistem pengendalian internal di desa, dengan memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa serta memastikan akuntabilitas dan integritas perangkat desa, karena hal ini sangat penting dalam memperbaiki penyajian laporan keuangan desa, dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan memastikan keakuratan dan kecepatan penyajian laporan keuangan.

- 3) Diharapkan Sebagai masyarakat desa, dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi cash management system dan menyajikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. masyarakat dapat meminta kepada pihak desa untuk meningkatkan implementasi cash management system dan menyajikan laporan keuangan secara teratur. Selain itu, masyarakat juga dapat mempelajari dan memahami pentingnya sistem pengendalian internal dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal) (Doctoral dissertation Universitas Pancasakti Tegal).
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). In UMMagelang Conference Series (pp. 266-284).
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* Vol.5, No. 3.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 9(3), 205-220.

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 10(5), 305-320.
- Astungkara, A., Dewi, R. R. dan Paramayana, N. M. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada DPRD Kota Surakarta). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8 (1), 189-198.
- Fikrian, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM Fekom* 6(2), 85-94.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, (2016). Buku Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Buku Aplikasi Analisis.
- Ginting, C. M., dkk. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu). *Jurnal Manajemen* 12(2), 39-54.
- Hanifah, F., & Maryati, S. (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 35-44.
- Harahap, Chairul Arief. (2018). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Desa Dengan Layanan Jasa Cash Management System. Studi Kasus: PT. Jasa Artha Cabang Medan. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Harahap, Chairul. (2018). Aspek hukum pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan layanan Cash Management System pada PT.Kelola Jasa Artha cabang Medan. *Journal of Financial and Economic*. Vol 9. No 3. 2019.
- Harahap, S. S. (2017). Manajemen kas dan strategi investasi. PT. RajaGrafindo Persada.
- Indriasih, D., Fajri, A. dan Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 11(3), 115-128.
- Ine, Favetyana. (2016). Peranan cash Management System untuk mempermudah Transaksi terhadap Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia, Kranganyar. *Jurnal Teknik Informasi* 7(3), 85-98.
- Irawan, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cash Management Pada PT. Dirgantara Yudha. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 26-40.
- Juliansyah Akbar. (2017). Perhitungan Manfaat Tangible Penerapan Cash Management System. Studi Kasus: Bank Daerah Mataram. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 6(2).
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.
- Kusumastuti, P. L. (2014). Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Makmur, (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masdar, Mas'ut, dan Lubis, F. K. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa, Dan Partisipasi Masyarakat

- Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, Vol 7(5) 238-248.
- Masniadi, R., & Rizqi, R. M. (2022). Pengaruh Stres Kerja, Biaya Kerja, Kompensasi Dan Disiplin Kerja Pada Produktivitas Karyawan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 5(2), 410-418.
- Mawaddah, Murhaban, dan Sari, D. K. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Lhokeumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, Vol 8(3), 110-118.
- Meilani, N. dan Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Bandung Conference Series: Accountancy*.
- Mualifu, Guspul, A., dan Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal Of Economic, Business, and Engineering* Vol 9(2), 210-219.
- Mulyadi (2017). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Perspektif Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nandea, Ayu Fitri. (2019). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Demak). *Journal Of Economic, Business, and Engineering* Vol 9(3), 302-312.
- Nugraha, A. R. (2019). Analisis Pengaruh Cash Management System Terhadap Profitabilitas pada PT. ABC. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 26(2), 145-157.
- Nugroho, A. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 57-68.
- Nurhayati. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 20(3), 65-78.